

PENGANTAR REDAKSI

Politik dan Kebijakan (Publik)

“The public is not to see where power lies, how it shapes policy, and for what ends. Rather, people are to hate and fear one another.” (Noam Chomsky 1997)

Noam Chomsky, seorang filosof ternama dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), dalam penggalan kutipannya di atas seolah ingin mengingatkan bahwa politik dan kebijakan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan (lihat juga Mead 2013). Di mana ada kebijakan, maka di situ terdapat kekuatan politik, kepentingan, dan aktor politik yang “bekerja” dan membentuk interseksi, atau bahkan terkadang persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian, setiap kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral (baca: bebas kepentingan).

Eksistensi sisi politis dari sebuah kebijakan itu yang pada praktiknya mewarnai kehidupan manusia di manapun mereka tinggal dan berada. Sebagai contoh kecil, Michael Hash (2008), seorang konsultan kesehatan Amerika Serikat (AS), dalam pidatonya ketika memberikan masukan kepada Komisi Energi dan Perdagangan, Subkomisi Kesehatan dan Lingkungan Parlemen AS mengatakan bahwa hubungan (*intersection*) antara politik dan kebijakan ada pada kepentingan itu dan tak jarang antara *politics* dan *policy goals* merupakan dua hal yang berbeda. Politik berbicara tentang tujuan seperti memperjuangkan nilai dan jabatan (*offices*) berhadapan dengan lawan politik, sementara kebijakan bertujuan untuk menghasilkan solusi terhadap masalah penting yang perlu mendapat dukungan dari pihak yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Konteks pidato Hash adalah tanggapannya terhadap kontroversi rencana digulirkannya kebijakan The Clinton Health Plan pada saat itu.

Meskipun demikian, bukan berarti tak ada pandangan yang bertolak belakang dengan perspektif di atas. Ada juga tesis yang menganggap bahwa justru kebijakan itu sendiri lah yang menentukan politik. Pan-

dangan itu datang dari Theodore Lowi yang percaya bahwa “*Policies determine politics*” (kebijakan menentukan seperti apa politik). Singkatnya, Lowi berpendapat bahwa sebuah kebijakan ada untuk redistribusi dan alokasi *costs and benefits* yang bersifat *unequal* dan bertemu dalam arena yang bercirikan konflik (baca: politik) (Lowi 1972 dalam Heinelt 2007, 109).

Artikel-artikel di dalam nomor ini secara garis besar mengulas tentang hal yang berhubungan dengan politik dan kebijakan (publik). Artikel-artikel yang dimaksud, adalah *policy transfer* (dalam artikel Alexander Hamonangan Nainggolan), kebijakan BPJS (dalam artikel Haryo Ksatrio Utomo), kebijakan pemberian bantuan oleh pemerintah daerah (dalam artikel Hisab Akbar Regaty), dan dalam konteks yang secara tidak langsung dalam perumusan RUU Keistimewaan Yogyakarta menjadi UU (dalam artikel Carolus Bregas Pranoto) serta dalam kaitannya kebijakan soal haji (dalam artikel Bayu Firdaus).

Seperti nomor-nomor sebelumnya, nomor ini terdiri dari 5 (lima) artikel dan 1 (satu) resensi). Jurnal ini dibuka dengan artikel berjudul “*Key Dynamics of Internationalization of Public Policy in the Context of Policy Transfer*”. Artikel ini membahas tentang sejauh mana kebijakan dapat berpindah sebagai sebuah proses dengan kompleksitas tinggi serta bersifat dinamis dalam kerangka internasionalisasi di era globalisasi. Artikel ini mengemukakan bahwa era globalisasi telah banyak menantang gagasan sistem negara-berbangsa tunggal dan otonomi negara-berbangsa majemuk yang ditandai adanya perubahan gerak dan dinamika hubungan antarnegara dan elemen-elemen di dalam negara, dalam perspektif perpindahan kebijakan.

Artikel berikutnya bertajuk “*Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta*”. Artikel ini mendiskusikan tentang klaim dan wewenang atas *Sultanaat Grond* (SG) seperti yang terdapat dalam UU Keistimewaan Yogyakarta. Menurut artikel itu, pluralisme hukum pertanahan bukanlah hasil dari kesalahan tata kelola pemerintahan, melainkan hasil rancangan dari pembangunan negara Indonesia sejak masa kolonial sampai dengan masa kini.

Artikel ketiga mengambil judul “*Kekuasaan Presiden, Institusi Informal, dan Pengesahan RUU tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)*” yang mengulas tentang eksaminasi praktik kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) ketika presiden mengintervensi proses pembahasan RUU tersebut di parlemen. Sebuah temuan penting yang dikemukakan di artikel itu adalah bahwa Presiden SBY memiliki kesengajaan dalam menggunakan dan memaksimalkan institusi informal dari kekuasaan presiden yang tidak dapat disentuh oleh parlemen.

Artikel keempat ialah mengenai keberhasilan *Civil Society Organization* (CSO) dalam memengaruhi kebijakan pemerintah kota. Mengambil judul “*Keberhasilan Kelompok Tani Sekar Mulyo dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tahun 2009-2016*”, Hisab Akbar Regaty mengelaborasi faktor-faktor yang mampu mendorong keberhasilan sebuah organisasi *civil society* di tingkat desa untuk memengaruhi kebijakan pemberian bantuan oleh pemerintah daerah. Yang menarik, Hisab menemukan tiga faktor yang menjadi penentu keberhasilan Kelompok Tani Sekar Mulyo adalah strategi kolaboratif organisasi *civil society*, modal sosial, dan hubungan klientelisme.

Artikel kelima berbicara mengenai praktik korupsi haji tahun 2010-2013. Dengan tajuk “Masalah Regulasi dan Pengawasan dalam Praktik Korupsi Haji Tahun 2010-2013”, artikel Bayu Firdaus ini mendiskusikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi haji. Argumen dari artikel ini adalah bahwa praktik korupsi haji tahun 2010-2013 disebabkan oleh regulasi yang bermasalah dan penyalahgunaan pengawasan oleh DPR. Selain itu, tulisan ini juga meninjau ulang faktor *opportunity* dalam teori GONE yang dicetuskan oleh Bologna.

Bagian akhir dari Jurnal Politik kali ini ialah resensi terhadap buku yang berjudul “*Politik Hukuman Mati di Indonesia*”. Resensi itu ditulis oleh Fikri Disyacitta. Dalam resensinya yang diberi judul “Dimensi Politik dalam Polemik Vonis Mati”, Fikri mengulas diskursus politik dalam kebijakan hukuman mati yang ada selama ini. Dengan mengacu kepada kasus-kasus yang ditulis dalam buku bunga rampai ini, Fikri

menyoroti sudut pandang politik yang masih belum menjadi *main-stream* yang diperhatikan kalangan akademisi, padahal hukuman mati merupakan produk negosiasi politik di tataran elite sehingga tentu memiliki dimensi politis pula yang menarik untuk diperhatikan.

Redaksi berharap semoga terbitan kelima Jurnal Politik ini dapat membangkitkan bergulirnya diskusi akademis ke depannya bagi semua pihak pembaca Jurnal Politik. Selamat menikmati!

DAFTAR PUSTAKA

- Chomsky, Noam. 1997. "Democracy Lite." *Index on Censorship* 26 (No.3): 56-58.
- Hash, Michael. 2008. "Intersection between Policy and Politics". Diunduh dari www.adea.org/policy_advocacy/.../IntersectionSpeech.pdf. (27 Agustus 2017).
- Heinelt, Hubert. 2007. "Do Policies Determine Politics?." dalam *Handbook of Public Policy: Theory, Politics, and Methods*. Fischer, Franck, Gerald J. Miller, dan Mara Sidney (Eds.). London: CRC Press.
- Mead, Lawrence. 2013. "Teaching Public Policy: Linking Policy and Politics." *Journal of Public Affairs Education* 19 (No.3): 389-403.